

PRAGMATISME POLITIK DAN IMPLIKATUR DALAM DEBAT PUBLIK PILKADA KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2020

Tobias Gunas

Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
tobgun74@gmail.com

Abstract

In the regional election, public debate is a forum of political idea contestation stating the political pragmatism conveyed in the political discourse. In this context, language plays a vital role as a means of communication striving for various politic ends. This research aims to analyse and account for political pragmatism and implicature implied in the utterances expressed by the two candidates of the head of regency in Manggarai. Descriptive qualitative research was applied to unveil the political pragmatism and implicature. Documentation, listening, and note-taking were the techniques used to gather the data from the recorded video released by the local election commission of Manggarai regency. The data were analysed based on implicature and discourse theories. The results of the study reveal that all the utterances expressed in the public debate contain implicatures, not conventional implicature and conversational implicature. Both types of implicature were closely related to the topics of the public debate as the context building and political interest. Meanwhile, the political pragmatism is categorised into positive and negative types. The positive political pragmatism shows more realistic way of thinking and has the orientation toward the development and progress in Manggarai regency. However, the negative political implicature tends to be more unrealistic and even exploitative as well as the orientation of winning the local political contestation.

Key Word: political pragmatism, implicature, political discourse, public debate.

Pendahuluan

Bahasa merupakan sarana komunikasi yang strategis dalam proses interaksi sosial antar individu maupun kelompok masyarakat. Artinya, interaksi sosial tidak bisa berlangsung tanpa adanya penggunaan bahasa. Bahasa mendukung dan memudahkan individu atau kelompok masyarakat dalam menjalankan semua aktivitasnya. Beragam fungsi bahasa dapat digunakan dalam berbagai ranah kehidupan manusia. Perbedaan ranah menyebabkan seorang penutur atau kelompok masyarakat menerapkan fungsi bahasa yang berbeda sehingga selaras dengan konteks komunikasi yang melatarinya. Dalam konteks inilah, bahasa memengaruhi cara berpikir dan bertindak manusia terhadap realitas yang terjadi dalam kehidupannya. Misalnya, bahasa yang digunakan dalam wacana politik bertujuan untuk merepresentasi kekuasaan dan tindakan politik yang disebut oleh Habermas sebagai “sarana kekuasaan” (Nur, 2010:290).

Penggunaan bahasa dalam dunia politik tentu berbeda dari interaksi sehari-hari. Perbedaan bahasa itu dapat dicermati baik melalui bentuk, makna, maupun fungsinya. Dalam hal bentuk, bahasa dalam dunia politik memiliki karakteristik tertentu, seperti pilihan leksikon, konstruksi kalimat dan wacana serta stilistik. Selain itu, bahasa dalam konteks politik

menyampaikan beragam makna yang syarat dengan kepentingan politik. Demikian juga terkait dengan fungsi, bahasa dalam komunikasi politik digunakan untuk menyampaikan beragam fungsi, antara lain menegosiasi kepentingan politik, membangun gagasan, memengaruhi pemilih, dan membentuk citra politik. Negosiasi adalah salah satu ciri penggunaan bahasa dalam proses pembuatan pilihan berdasarkan prinsip-prinsip dan strategi yang sangat dinamis menurut pandangan Verschueren (1999) (Al-gublan, 2015). Karena itulah, bahasa dipandang sebagai media atau alat komunikasi politik (Nasution, 2007). Hal ini menegaskan bahwa bahasa adalah alat atau sarana untuk mewujudkan kepentingan politik.

Terkait komunikasi politik, bentuk bahasa yang umumnya dimanfaatkan oleh para politisi meliputi penggunaan jargon-jargon politik, slogan, gaya bahasa, ungkapan-ungkapan dan wacana. Bentuk-bentuk bahasa tersebut disampaikan melalui berbagai media dan forum, seperti baliho, media sosial, kampanye, debat publik, pernyataan politik, pidato dan dialog. Semuanya dieksploitasi untuk menyampaikan pesan politik tertentu. Untuk tujuan politik, bahasa menjadi alat permainan bagi para politisi untuk memenangkan sebuah kontestasi. Dalam terminologi Wittgenstein dalam penggunaan bahasa terdapat permainan bahasa. Penggunaan bahasa dalam politik dengan sendirinya merupakan permainan, yaitu permainan bahasa (*language games*). Sebagian besar tindakan manusia, termasuk tindakan politik dilakukakan lewat dan dipengaruhi oleh penggunaan dan artikulasi kebahasaan.

Dalam kontestasi Pilkada, debat publik umumnya dijadikan sebagai forum strategis bagi para kandidat kepala daerah untuk saling memperdebatkan gagasannya secara rasional dan persuasif. Karena itu, argumentasi dibangun melalui penggunaan bahasa seperti leksikon, frasa, kalimat dan wacana. Unsur-unsur linguistik ini dieksploitasi untuk mengartikulasi kepentingan politik tertentu, yang paling utama tentu untuk memenangkan kontestasi politik. Di sinilah, bagaimana bahasa dikonstruksi untuk menarik perhatian para pemilih dan meningkatkan elektabilitas. Topik yang diperdebatkan terkait dengan visi-misi dan program kerja. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Manggarai, Flores-NTT, KPUD telah melaksanakan debat publik yang melibatkan dua kandidat, yaitu pasangan Deno-Madur (DM) dan Heri Nabit-Heri Ngabut (H2N). Hal yang menarik untuk dikaji dalam debat publik tersebut adalah implikatur yang tersirat dibalik semua pernyataan dan argumentasi politik yang dibuat oleh kedua kandidat di tengah atmosfer rivalitas yang ketat. Implikatur adalah bagian yang inheren untuk memahami makna dan pesan tersirat yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam debat publik.

Kajian tentang implikatur dalam wacana politik pilkada telah menjadi isu yang menarik dalam sejumlah penelitian. Misalnya, Abidin dkk (2014) melakukan kajian tentang implikatur dan gaya bahasa dalam wacana iklan kampanye politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat implikatur dalam 48 buah iklan kampanye politik calon anggota DPRD didominasi oleh gabungan antara pernyataan dan permohonan dari jumlah keseluruhan, yakni 22 variasi wujud implikatur. Pada fungsi implikatur ditemukan jumlah variasi fungsi implikatur yang sesuai dengan wujud implikatur. Sementara, gaya bahasa yang ditemukan dalam wacana iklan kampanye politik calon anggota DPRD Kota Pontianak pada pemilihan umum 2014 yang mendukung kemunculan implikatur ialah berjumlah 30 variasi. Namun, penelitian ini tidak menunjukkan tipe implikatur yang dominan digunakan dalam iklan kampanye politik. Demikian juga, dalam penelitian Yuniati dkk (2020) ditemukan implikatur konvensional yang paling dominan dalam wacana kampanye politik pada pemilihan legislatif 2019. Penelitian ini lebih spesifik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang memperkuat temuan tentang implikatur dalam wacana kampanye politik.

Selanjutnya, Kajian yang dilakukan oleh Pertiwi, Cahyono dan Pupitasari (2018) juga difokuskan pada implikatur dalam konteks pilkada di Kota Madiun pada tahun 2018. Metode penelitian kualitatif dengan teknik dokumentasi diterapkan untuk mengumpulkan data dari gambar dan video yang berisikan gambar-gambar mengenai program unggulan para pasangan Calon Walikota Madiun. Temuan penelitian ini mengungkapkan tiga hal yang saling terkait, yaitu konteks, tindak tutur, dan implikatur. Temuan penelitian ini menegaskan hubungan tiga komponen tersebut yang membentuk wacana kampanye politik. Berbeda dari tiga penelitian tersebut, Al-gublan (2015) lebih menitikberatkan pada penerapan model analisis pragmatik adaptasi linguistik teori (Linguistic Adaptation Theory) dari Verschueren (1999) untuk menjelaskan penggunaan bahasa dalam konteks wacana politik. Temuannya mengungkapkan bahwa penggunaan bahasa dalam diskursus politik dikonstruksi melalui adaptasi linguistik seperti konteks, struktur, dinamika, dan salience. Teori adaptasi linguistik ini dapat diaplikasikan untuk menginterpretasi aspek implikatur dalam wacana debat politik. Penelitian lain tentang bahasa dalam wacana kampanye politik dilakukan oleh (Hoon & Ramanathan, 2020) yang mengkaji penggunaan aspek strategi wacana dan tindak tutur dari pendekatan analisis wacana kritis Wodak dan teori Searle. Kajian ini mengungkapkan bahwa penggunaan leksikal dalam kampanye politik mencerminkan pengalaman dan pandangan politik yang kuat diyakini oleh dua tokoh politik serta menerapkan tindak tutur komisif dan direktif. Selanjutnya,

eksploitasi bahasa dalam wacana politik juga disampaikan melalui penggunaan metafora yang mengandung suatu maksud tersirat atau makna implikatur (Agbo et al., 2018).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut mengangkat topik yang sama tentang implikatur dalam wacana politik dengan pendekatan berbeda, tapi paling tidak hasil kajiannya dapat menggambarkan penggunaan bahasa dan implikatur sebagai bagian vital dari analisis pragmatik. Berbeda dengan sejumlah penelitian tersebut, kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pragmatisme politik dan implikatur dalam wacana debat publik pemilihan kepala daerah. Unsur-unsur linguistik yang diteliti meliputi lesikon, kalimat dan wacana yang mengandung implikatur tertentu, berhubungan dengan konteks dan kepentingan politik.

Levinson (1983) mengemukakan pengertian pragmatik sebagai bidang kajian tentang hubungan antara bahasa dan konteks yang dikaidahkan dalam struktur bahasa. Pengertian ini menegaskan kaitan bahasa dalam konteks penggunaannya. Karena itu, kajian pragmatik mencakup penggunaan bahasa dan konteks yang melatarinyai. Karena itu, bahasa yang digunakan dalam komunikasi terikat konteks (Mey, 2001). Dengan demikian, kajian pragmatik tidak bisa dilepaskan dari masalah konteks yang menjadi latar suatu peristiwa tutur atau komunikasi terjadi. Menurut Leech (2014), dalam kajian pragmatik, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus analisis. Aspek- aspek tersebut mencakup penutur dan lawan tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas, dan tuturan sebagai produk tindak verbal.

Implikatur adalah salah satu aspek yang dikaji dalam pragmatik. Pemahaman terhadap konsep implikatur sangat penting karena terkait makna tuturan yang disampaikan secara tersirat terikat dengan konteks tertentu. Implikatur adalah suatu ujaran atau tuturan yang menyiratkan sesuatu yang sebenarnya berbeda dengan yang apa yang diucapkan. Artinya, implikatur adalah sesuatu yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Konteks berperan sangat penting untuk memahami implikatur dari suatu peristiwa ujaran. Terkait dengan konteks, Grice mengklasifikasi implikatur ke dalam dua jenis, yaitu: implikatur umum (*generalized implicature*) dan implikatur khusus (*specialized implicature*) (Clark, 2013). Implikatur umum yang juga disebut konvensional implikatur merupakan makna dari suatu ujaran atau tuturan yang umumnya dipahami oleh orang tanpa memerlukan konteks, sedangkan implikatur khusus atau nonkonvensional adalah makna dari suatu ujaran atau tuturan yang terikat konteks khusus.

Selanjutnya, Clark (2013) membuat distingsi konsep untuk membedakan pengertian implikatur dari eksplikatur. Dikatakan bahwa implikatur merupakan makna pragmatik yang merupakan implikasi dari suatu tuturan (bahasa). Berdasarkan distingsi tersebut, konsep

implikatur dapat diartikan sebagai makna tuturan yang tidak disampaikan langsung. Dalam kerangka teori relevansi, implikatur diartikan sebagai makna yang tidak dinyatakan secara eksplisit atau bukan bagian dari apa yang diungkapkan secara langsung atau eksplisit. Untuk memahami ini diperlukan kognisi yang berhubungan dengan pengetahuan tentang konteks yang melingkupi suatu tuturan.

Eksplorasi bahasa dalam berbagai kontestasi politik tentu tidak terlepas dari kepentingan politik, seperti kekuasaan, kedudukan, jabatan, uang, dan status sosial. Kepentingan politik dapat dipahami sebagai bentuk pragmatisme. Pragmatisme politik merupakan sikap, cara pandang dan tindakan yang mengakomodasi segala hasrat serta kepentingan politik untuk meraih kekuasaan (power), manfaat (utility), dan kemenangan (glory) (Ekowati, 2019). Dalam konteks debat publik Pilkada, pragmatisme politik dapat dicermati melalui penggunaan bahasa dari pasangan calon kepala daerah beserta wakil. Menurut (Marijan, 2006), ada dua tipe pragmatisme yang muncul dalam kontestasi politik, yaitu pragmatisme positif dan pragmatisme negatif. Pragmatisme positif menggunakan cara yang praktis dan nyata untuk memecahkan masalah. Sebaliknya, pragmatisme negatif menerapkan cara-cara yang bersifat transaksional (Ekowati, 2019).

Materi dan Metode

Penelitian deskriptif kualitatif diterapkan untuk menganalisis pragmatisme politik dan implikatur pada debat publik pada Pilkada di Kabupaten Manggarai tahun 2020. Data bersumber dari video rekaman debat publik Pilkada KPUD Manggarai, yang berisi ujaran-ujaran berbentuk kata dan kalimat yang diproduksi oleh dua pasangan kandidat Bupati dan Wakil DM dan H2N. Selanjutnya, data diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, simak, dan catat. Data dianalisis melalui tiga prosedur, yaitu (1) mengidentifikasi tuturan atau ujaran pada debat publik Pilkada dengan fokus pada aspek linguistik, yaitu leksikon dan kalimat, (2) mengklasifikasi jenis implikatur dan pragmatisme politik, dan (3) menginterpretasi implikatur dan pragmatisme politik yang tersirat dalam tuturan yang disampaikan dalam debat publik Pilkada tahun 2020. Teori Pragmatik, khususnya teori implikatur dari Clark (2013), dan teori pragmatisme politik (Marijan, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Secara struktur, debat publik Pilkada dikategorikan sebagai wacana lisan yang memiliki beberapa komponen, yaitu pembukaan, pemaparan visi-misi dan program kerja, perdebatan,

dan penutup. Pembahasan ini lebih difokuskan pada analisis bentuk wacana yang digunakan dan makna implikatur yang ditemukan dalam tuturan-tuturan yang disampaikan oleh kedua kandidat calon Kepala Daerah.

Debat publik Pilkada Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada tanggal 14 November 2020, bertempat di gedung MCC. Debat publik ini dibuka secara resmi oleh ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai, yang menegaskan bahwa tujuan diselenggarakannya debat publik adalah untuk memberi pencerahan dan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama para pemilih. Pada tahap pemaparan visi-misi, setiap pasangan calon mempresentasikan gagasan dan program kerja lima tahun ke depan. Pasangan calon bupati Deno-Madur (DM) menyampaikan gagasan dan program kerja yang berorientasi pada “Manggarai yang maju, berkualitas, makmur, merata, sejahtera dan berdaya saing berbasis gotong-royong”. Ini adalah sebuah pernyataan politik yang menegaskan bahwa masyarakat Manggarai memerlukan kemajuan di segala aspek kehidupan. Sementara, pasangan calon bupati Heri Nabit-Heri Ngabut (H2N) mengemukakan gagasan tentang “Manggarai yang maju, adil dan berdaya saing”. Kemajuan Manggarai harus disertai dengan dinamika perubahan yang senantiasa berjalan terus. Pernyataan ini menegaskan pandangan politiknya tentang kemajuan dan perubahan. Kedua pernyataan politik tersebut merupakan janji dan framing politik. Di samping itu, pernyataan politik tersebut adalah bentuk pencitraan politik yang memberi kesan bahwa keduanya menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap pembangunan di daerah Manggarai. Pada tahap selanjutnya, kedua pasangan calon terlibat proses debat dimana terjadi saling tukar argumen. Selama proses debat ini, para politisi ini menyampaikan sejumlah tuturan (ujaran) sebagai wacana politik yang memuat implikatur tertentu. Berikut ini adalah analisis implikatur dari sejumlah tuturan yang telah diidentifikasi dari video debat publik Pilkada Manggarai tahun 2020. Beragam topik diperdebatkan dalam forum debat publik Pilkada seperti terlihat pada data berikut.

Data (1) Topik Debat Publik

Topik	Isu
Pembangunan	Kesejahteraan masyarakat
Pendidikan	Peningkatan SDM Dan daya saing
Kesehatan	Pelayanan dan fasilitas kesehatan serta penanganan Covid-19
Ekonomi	Daya saing produk tingkat lokal, nasional dan internasional Peningkatan PAD
Budaya	Pembangunan berbasis budaya Manggarai
Lingkungan	Pembangunan berbasis lingkungan hidup.

Data (1) di atas menunjukkan topik dan isu yang menjadi fokus pemaparan dan argumentasi dalam debat publik Pilkada Kabupaten Manggarai tahun 2020. Semua topik dan isu tersebut dielaborasi oleh masing-masing kandidat melalui konstruksi bahasa yang argumentatif dan persuasif. Dalam proses perdebatan tergambar dengan jelas perspektif politik dan ideologi yang menjadi dasar argumentasi dari kedua kandidat. Selain itu, argumentasi yang dibangun juga menunjukkan implikatur dan pragmatisme politik dari kedua pasangan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai. Data yang ditampilkan dan dianalisis pada bagian ini adalah tuturan yang dibuat kedua pasangan calon ketika menjawab pertanyaan yang diajukan oleh moderator terkait pendalaman visi-misi. Berikut ditampilkan data tuturan yang disampaikan oleh kedua pasangan calon.

Data (2)

- Moderator : Bagaimana pasangan calon nomor urut 1 menguraikan visi-misi tersebut sebagai kerangka kerja utama dalam mengoperasionalkan program kerja? strategis?
- H2N : Baik, sebagai kerangka kebijakan bahwa ke depan kita harus menempatkan Manggarai sebagai kabupaten dengan seluruh masyarakatnya berada di antara daerah-daerah lain dalam bingkai NKRI. Karena itu, ukuran-ukuran kemajuan harus diperbandingan dengan daerah-daerah lain yang setara.

Data (2) di atas menunjukkan bahwa tuturan yang dibuat oleh pasangan H2N tidak sekadar menjawab pertanyaan, tetapi menegaskan sebuah wacana politik yang mengandung implikatur tertentu. Untuk mengetahui implikatur dari tuturan tersebut, kita perlu memahami implikasi yang terkandung di dalamnya. Adapun sejumlah implikasi yang dapat dikemukakan dari tuturan politik tersebut sebagai berikut:

- a. H2N menganggap bahwa Manggarai tidak bisa berdiri untuk mencapai kemajuan dan perubahan.
- b. Kabupaten Manggarai harus bekerjasama dengan daerah-daerah lain di sekitarnya di wilayah Flores untuk mewujudkan kemajuan dan perubahan.
- c. Kabupaten Manggarai tidak bisa hanya menggunakan ukuran-ukuran kemajuan lokal, tetapi harus mengacu pada parameter kemajuan skala nasional.
- d. Kabupaten Manggarai selama ini tidak melihat kemajuan dan perubahan yang terjadi daerah lain.
- e. Pembangunan di Kabupaten Manggarai belum mengalami kemajuan dan perubahan seperti di daerah lain.
- f. Kabupaten Manggarai memerlukan intervensi dari pihak pusat dan daerah lain untuk mewujudkan kemajuan dan perubahan.

Dari semua implikasi tersebut, manakah yang menjadi implikatur tentu harus memahami konteks pembangunan di Manggarai secara keseluruhan. Menurut pasangan ini, konteks pembangunan di Manggarai mengalami stagnasi dan kemunduran. Berdasarkan konteks inilah, ditemukan implikatur yang paling kuat menurut teori Clark (2013) adalah dinyatakan secara tersirat pada poin (6) yaitu “Kabupaten Manggarai memerlukan intervensi dari pihak pusat dan daerah lain untuk mewujudkan kemajuan dan perubahan”. Jika mengacu pada teori implikatur Grice, implikatur yang tersirat dalam tuturan tersebut dapat dikategorikan sebagai “non-konvensional implikatur”.

Data (3)

- Moderator : Bagaimana pasangan calon nomor urut 2 menguraikan visi-misi tersebut sebagai kerangka kerja utama yang dioperasionalkan dalam program kerja strategis?
- H2N : Kalau kita bicara kemajuan dalam perspektif pembangunan, ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Target-target capaian yang digunakan harus terukur.

Data (3) menunjukkan bahwa pasangan calon DM memiliki pandangan politik yang berbeda tentang kemajuan dan perubahan di kabupaten Manggarai. Terlepas dari perbedaan pandangan politik, dari segi wacana politik tuturan yang dibuat tersebut tentu menyampaikan implikatur tertentu yang dapat diidentifikasi dari sejumlah implikasi berikut.

- a. Kabupaten Manggarai sudah mengalami kemajuan berdasarkan target-target capaian yang terukur.
- b. Kabupaten Manggarai harus melakukan perencanaan yang baik untuk mewujudkan kemajuan dan perubahan dalam pembangunan.
- c. Pembangunan di Kabupaten Manggarai selalu dinamis searah dengan kemajuan dan perubahan yang terjadi secara lokal dan nasional.
- d. Kabupaten Manggarai tidak mengalami stagnasi dan kemunduran dalam pembangunan.

Berdasarkan pada sejumlah implikasi tersebut, kita dapat menemukan satu implikatur yang paling kuat atau mendekati yang relevan dengan tuturan dari pasangan calon DM tersebut, yaitu “Kabupaten Manggarai sudah mengalami kemajuan dan perubahan berdasarkan target-target capaian yang terukur”. Implikatur ini menegaskan bahwa pasangan kandidat DM menolak anggapan bahwa pembangunan di Kabupaten Manggarai mengalami stagnasi dan kemunduran. Jika dikategorikan, implikatur ini adalah implikatur “non-konvensional” karena

memerlukan pengetahuan konteks khusus untuk memahaminya, misalnya target-target capaian dan konteks pembangunan di Manggarai secara keseluruhan.

Simpulan

Kajian tentang implikatur dalam wacana politik seperti debat publik tidak dapat dilepaskan dari implikatur yang tersirat di dalamnya. Berdasarkan hasil kajian ini, ada beberapa poin kesimpulan yang bisa dikemukakan di sini. Pertama, debat publik sebagai bentuk wacana politik mengandung kepentingan politik. Dalam kepentingan politik, bahasa digunakan sebagai media komunikasi politik. Kedua, setiap tuturan politik yang disampaikan dalam debat publik mengandung implikatur non-konvensional. Ketiga, implikatur yang disampaikan secara tersirat dalam tuturan tersebut terikat konteks politik yang melatarinya. Keempat, implikatur non-konvensional yang ditemukan dalam tuturan tersebut mengungkapkan secara implisit rivalitas pandangan politik dari dua pasangan tersebut. Implikatur yang ditemukan dalam debat publik Pilkada Kabupaten Manggarai menunjukkan pragmatisme politik yang positif tentang orientasi kemajuan dan perubahan pembangunan ke depan.

Rujukan

- Abidin, Z., Saman, S., & Muzamil, A. R. (2014). *Implikatur dalam wacana iklan kampanye politik calon anggota dprd kota pontianak pada pemilihan umum 2014*. 1–15.
- Agbo, I. I., Kadiri, G. C., & Ijem, B. U. (2018). Critical Metaphor Analysis of Political Discourse in Nigeria. *English Language Teaching*, 11(5), 95–103. <https://doi.org/10.5539/elt.v11n5p95>
- Al-gublan, B. K. (2015). A Pragmatic Study of a Political Discourse from the Perspective of the Linguistic Adaptation Theory. *International Journal of English Linguistics*, 5(2), 151–164. <https://doi.org/10.5539/ijel.v5n2p151>
- Clark, B. (2013). *Relevance theory* (First edit). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.4324/9781315045580-12>
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik : Antara Koalisi , Pencalonan , dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 16–37.
- Fairclough, Isabela & Fairclough, N. (2012). *Political Discourse Analysis*. Routledge.
- Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis : the Critical Study of Language* (second edi). Routledge.
- Hoon, Tan Bee & Ramanathan, R. (2020). Discursive Strategies and Speech Acts in Political Discourse of Najib and Modi. *International Journal of Education*, 8(3), 34–44.
- Leech, G. (2014). *The pragmatics of Politeness*. Oxford University.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics* (First edit). Cambridge University.

- Mey, J. L. (2001). *Pragmatics: An introduction* (2nd ed.). Blackwell.
- Nasution, Z. (2007). Bahasa sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3), 445–464. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5897>
- Nur, Y. (2010). Representasi Kekuasaan Dalam Wacana Politik (Kajian Etnografi Komunikasi). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik FISIP, Universitas Tadulako*, 2, 289–300.
- Pertiwi, Maulina Jelita, Cahyono, Bambang Eko & Pupitasari, D. (2018). Konteks dan implikatur dalam wacana kampanye politik pilkada calon walikota dan calon wakil walikota madiun periode 2019-2024. *Widyakastara*, 06(2), 51–60.
- Yuniati, Ira, Kusmiarti, Reni, Kanizar, Abdi & Suyuthi, H. (2020). Implikatur Dalam Wacana Kampanye Pemilihan Legislatif 2019. *Jurnal KIBASP (Kajian Bahasa, Sastra Dan Pengajaran)*, 3(2), 276–288. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/kibasp.v3i2.1249>
- Abidin, Z., Saman, S., & Muzamil, A. R. (2014). *Implikatur dalam wacana iklan kampanye politik calon anggota dprd kota pontianak pada pemilihan umum 2014*. 1–15.
- Agbo, I. I., Kadiri, G. C., & Ijem, B. U. (2018). Critical Metaphor Analysis of Political Discourse in Nigeria. *English Language Teaching*, 11(5), 95–103. <https://doi.org/10.5539/elt.v11n5p95>
- Al-gublan, B. K. (2015). A Pragmatic Study of a Political Discourse from the Perspective of the Linguistic Adaptation Theory. *International Journal of English Linguistics*, 5(2), 151–164. <https://doi.org/10.5539/ijel.v5n2p151>
- Clark, B. (2013). *Relevance theory* (First edit). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.4324/9781315045580-12>
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik : Antara Koalisi , Pencalonan , dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 16–37.
- Fairclough, Isabela & Fairclough, N. (2012). *Political Discourse Analysis*. Routledge.
- Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis : the Critical Study of Language* (second edi). Routledge.
- Hoon, Tan Bee & Ramanathan, R. (2020). Discursive Strategies and Speech Acts in Political Discourse of Najib and Modi. *International Journal of Education*, 8(3), 34–44.
- Leech, G. (2014). *The pragmatics of Politeness*. Oxford University.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics* (First edit). Cambridge University.
- Mey, J. L. (2001). *Pragmatics: An introduction* (2nd ed.). Blackwell.
- Nasution, Z. (2007). Bahasa sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3), 445–464. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5897>
- Nur, Y. (2010). Representasi Kekuasaan Dalam Wacana Politik (Kajian Etnografi Komunikasi). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik FISIP, Universitas Tadulako*, 2, 289–300.
- Pertiwi, Maulina Jelita, Cahyono, Bambang Eko & Pupitasari, D. (2018). Konteks dan implikatur

dalam wacana kampanye politik pilkada calon walikota dan calon wakil walikota madiun periode 2019-2024. *Widyakstra*, 06(2), 51–60.

Yuniati, Ira, Kusmiarti, Reni, Kanizar, Abdi & Suyuthi, H. (2020). Implikatur Dalam Wacana Kampanye Pemilihan Legislatif 2019. *Jurnal KIBASP (Kajian Bahasa, Sastra Dan Pengajaran)*, 3(2), 276–288. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/kibasp.v3i2.1249>